

## **KAJIAN PERKEMBANGAN PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARIWISATA DAN TEMPAT REKREASI KOTA SUNGAI PENUH**

**Yopanda Yudistira, S.AP<sup>1</sup>, H.Mhd.Ikhsan, S.E.,M.M<sup>2</sup>, Emilya Gusmita, S.Sos.,M.Pd<sup>3</sup>**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

[jofandayudistira98@gmail.com](mailto:jofandayudistira98@gmail.com)

[mhdikhsan6@gmail.com](mailto:mhdikhsan6@gmail.com)

[emilya.gusmita@gmail.com](mailto:emilya.gusmita@gmail.com)

### *ABSTRACT*

It is known that the tourism sector is one of the sectors that is a source of promising local retribution revenue which will later be accumulated into a source of regional PAD and can be utilized for the interests of the community, therefore the importance of good management by the parties concerned and under the supervision of the local government and society so that irresponsible parties or unscrupulous people are not tampered with. So in its implementation we need to know how the mechanisms and good governance are so that both in the effort to increase the acceptance of fees and what strategies are carried out in its implementation, hopefully it can also increase the business opportunities of the community itself, both directly and indirectly, this is what determines the level of success. good tourism management. In an effort to improve the Maintenance and Construction of Facilities in Tourist Destinations, which is one of the efforts to improve the safety and comfort of visitors and is one part of tourism promotion.

***Keywords: Tourism, Management, Retribution***

### *ABSTRAK*

Yopanda Yudistira, NPM.1610078201203 “Diketahui bahwa sector pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber penerimaan retribusi daerah yang cukup menjanjikan yang nantinya akan di akumulasikan menjadi sumber PAD daerah tersebut dan dapat di mamfaatkan utuk kepetingan di masyarakat, oleh karena itu pentingnya pengelolaan yang baik oleh pihak terkait dan dibawah pengawasan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga tidak terjadi penyelawengan pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dalam pelaksanaanya kita perlu mengetahui bagaimana mekanisme dan tata kelola yang baik sehingga baik dalam usaha peningkatan penerimaan retribusi dan strategi apa yang di lakukan dalam pelaksanaannya, harapanya bisa juga meningkatkan peluang usaha masyarkat itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini lah yang menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan pariwisata yang baik. Dalam usaha meningkatkan Pemeliharaan dan Pembangunan Fasilitas di Destinasi Wisata, yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung dan merupakan salah satu bagian dari promosi pariwisata.

***Kata Kunci: Pariwisata, Pengelolaan, Retribusi***

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Upaya dalam peningkatan pendapatan oleh setiap pemerintah daerah pada level Propinsi maupun Kabupaten/Kota Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kota sungai penuh telah di jadikan destinasi pariwisata atau Kawasan strategis Pariwisata nasional (KSPN) ,dengan mengandalkan potensi alam yang indah dan unik.oleh karena itu pemerintah kota sungai penuh juga mefokuskan pembangunan untuk menarik wisatawan agar tertarik untuk datang menikmati keindahan kota dingin tak bersalju Kota sungai Penuh. Usaha ini ditujukan untuk penunjang atau pendukung dalam kotribusi retribusi yang dilakukan oleh sektor pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh.

Keberhasilan dalam pengelolaan Retribusi Parwisata yang ada di Kota Sungai Penuh yang memiliki beberapa tantangan seperti pemeliharaan tempat wisata, tangan tangan tak bertanggung jawab dan juga kurangnya pembangunan yang merata, kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga oknum dari pihak yang mengambil keuntungan dari Retribusi di tempat wisata seperti penyalahan dalam cara pemungutan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Selain dari pada itu koteks keberhasilan pengelolaan retribusi tempat wisata tersebut kembali ke kebijakan yang harus di ukur tingkat efektifitas dan efisiensinya dan juga ada beberapa faktor yang di pertimbangkan dan di perhatikan akan yang mempengaruhinya, seperti jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, dan tentunya pendapatan perkapita.

### Tinjauan Pustaka

#### **Kajian Perkembangan Pengelolaan Retribusi Pariwisata Dan Tempat Rekreasi Kota Sungai Penuh**

Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari retribusi pengunjung, retribusi izin penempatan lokasi dagang dan retribusi tempat parkir.

Menurut Sunarto (2005: 15) retribusi pariwisata adalah pungutan yang dikenakan pada pengunjung dan pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas kunjungan tempat pariwisata atau pemakaian tempat-tempat pariwisata yang digunakan oleh pengunjung dan pedagang yang ada didalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Wajib retribusi adalah pengunjung yang mendatangi lokasi pariwisata,
2. Obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat pariwisata, sedangkan subyek retribusi adalah pengunjung yang mendatangi tempat pariwisata,

3. Penerimaan dari retribusi pariwisata masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pariwisata sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi,
4. Retribusi pariwisata yang dikenakan setiap pengunjung sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan,
5. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi,
6. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pengunjung yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta di terapkan sistem denda.

## II. METODE PENELITIAN

### Metode Penelitian

#### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 15) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *Postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

### Informan Penelitian

#### Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiono, Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2010 : 300) Informan dalam penelitian ini berasal dari orang yang berkaitan langsung dalam Pengelolaan Retribusi Pariwisata Dan Tempat Rekreasi Kota Sungai Penuh yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata di Bidang Pariwisata Kota Sungai Penuh dan Pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam pengelolaannya.

### Jenis Dan Sumber Data

#### Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber aslinya. Data primer merupakan data diambil melalui hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pariwisata Kota Sungai Penuh dan pihak yang berhubungan dengan pengelolaan tempat pariwisata Kota Sungai Penuh.

#### Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indrianto dan Supomo, 1999). Data sekunder yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari berbagai penerbitan pemerintah pusat dan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pariwisata Kota Sungai Penuh dan data lainnya yang dianggap dapat mendukung penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

### Observasi

Observasi menurut Arikunto (2010:199) meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

### Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013: 317) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

### Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:274) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### Alat Pengumpul Data

#### Recorder/Handphone

Alat yang di gunakan untuk sebagai alat bantu pengumpulan informasi dari informan dengan hasil rekaman suara dari informan wawancara.

#### Kamera

Alat yang di gunakan untuk mendokumentasikan pelaksanaan wawancara dengan informan sebagai Dokumentasi dari kegiatan penelitian.

#### Alat Tulis Kantor

Alat yang digunakan untuk mencatat dan mendiskripsikan hasil wawancara dari informan guna memudahkan peneliti untuk menyimpan data penelitian.

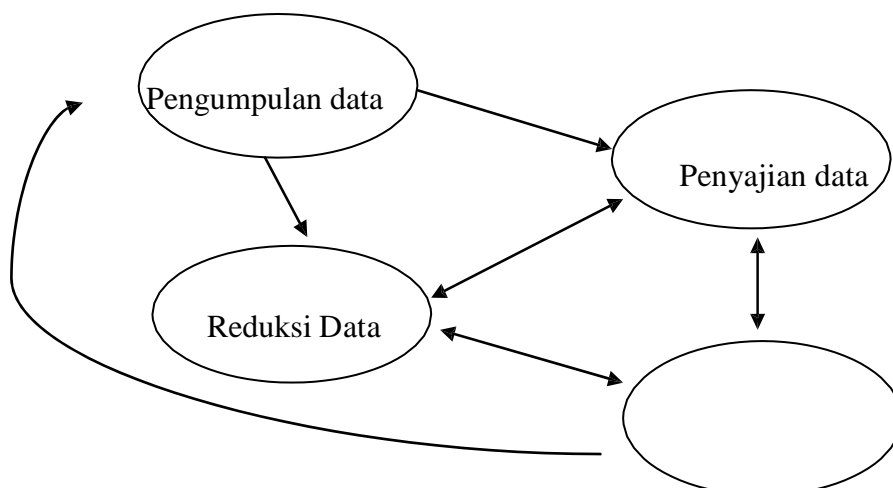
### Unit Analisis

Sedangkan unit analisis adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pariwisata yang merupakan unit operasional menjalankan kegiatan retribusi tempat wisata Kota Sungai Penuh, dan yang mengelola keuangan terkait dengan retribusi tersebut.

### Analisi Data

Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Langkah-langkah analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Penarikan  
Kesimpulan

**Gambar 1.2 Komponen dalam Analisis Data**  
(Sugiyono 2013: 338)

### Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong (2008:326-332) agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/kevalidan data.

### Tringulasi Sumber

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Retribusi Jasa Umum

Pembenahan fasilitas yang menjadi fokus untuk peningkatan pelayanan di Destinasi wisata, dan kebijakan yang di ambil juga dapat di lihat merupakan usaha yang di harapkan bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung, sehingga tertarik untuk kembali berkunjung ke destinasi tersebut. Namun utntuk saat ini selama pandemi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh memang tidak menjalankan kegiatan seperti biasa, sehingga termasuk pembanahan fasilitas di hentikan untuk sementara di samping juga adanya pembatasan pengunjung di karena sesuai ajuran Protokol Kesehatan dan target penerimaan yang di turunkan juga.

#### Retribusi Jasa Usaha

Dalam proses Pelaksanaan kepariwisataan yang menjadi tolak ukur keberhasilannya adalah Efektiftas dan Efisiensinya, dikarenakan dalam pengelolaan yang baik akan memiliki target dan realisasi yang baik dan tercapai di sehingga itu menjadi kunci pembuatan kebijakan yang akan di lakukan kedepannya. Termasuk juga di Kota Sungai Penuh Juga memiliki Target dan Realisasi setiap tahunnya seperti yang awalnya

**Tabel 3.1**

**Target dan Realisasi Retribusi Tempat Wisata tahun 2019-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 207.000.000	Rp. 189.000.000	91,3 %
2020	Rp. 248.400.000	Rp. 37.000.000	14,8 %

Sumber.Disbudpar Kota Sungai Penuh

Akan tetapi untuk saat ini target yang di sebelumnya Rp. 248.400.000 turun pada bulan mei 2020 di karenakan Covid-19 dan target realisasinya menjadi turun signifikan walaupun data untuk saat ini realisasinya melampaui target

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Retribusi Tempat Wisata tahun 2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	Rp. 30.000.000	Rp. 38.525.000	128,4 %

Sumber. Disbudpar Kota Sungai Penuh

Pada tahun 2019

$$\text{Efektifitas} = \frac{189.000.000}{207.000.000} \times 100\% \\ = 91,3 \%$$

Dari perhitungan efektifitasnya pada tahun 2019 hasilnya 91,3%, karena rasionya antara 90 %-99% maka di kategorikan “cukup efektif”.

Pada tahun 2020

$$\text{Efektifitas} = \frac{37.000.000}{248.400.000} \times 100\% \\ = 14,9 \%$$

Dari perhitungan efektifitasnya pada tahun 2020 memang hasilnya 14,9% yang memperlihatkan sangat jauh dari target di tetapkan, di karenakan ini perhitungan sampai pertengahan tahun 2020 di karenakan Covid 19

Pada tahun 2020 Saat ini menyesuaikan dengan situasi saat ini

$$\text{Efektifitas} = \frac{38.525.000}{30.000.000} \times 100\% \\ = 128,4\%$$

Berbeda halnya Dari perhitungan efektifitasnya pada tahun 2020 setelah target di ubah dan diturunkan hasilnya 128,4%, karena rasionya >100 maka di kategorikan “sangat efektif”.

untuk menghitung efesisensi penesimaan retribusi yang di formulasikan dengan

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pungutan retribusi}}{\text{Realisasi penerimaan retribusi}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi, adalah untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menekan biaya pemungutan retribusi daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah efisien apabila rasio yang dicapai antara 10%-20% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

Pada tahun 2019

$$\text{Efisiensi} = \frac{600.000.000}{189.000.000} \times 100\% \\ = 317,46\%$$

Dari perhitungan efisiensi pada tahun 2019 dapat dilihat cukup signifikan antara penggunaan anggaran dengan realisasi Walaupun cukup efektif tapi tidak efisien Pada tahun 2020

$$\text{Efisiensi} = \frac{200.000.000}{38.525.000} \times 100\% = 519,14\%$$

Termasuk perhitungan efisiensi pada tahun 2020 dapat dilihat memang untuk penggunaan anggaran pada tahun ini tidak menggambarkan hasil sesungguhnya dari perkembangan pengelolaan namun bisa juga dilihat penggunaan anggaran dengan realisasi Walaupun cukup efektif tapi tidak efisien.

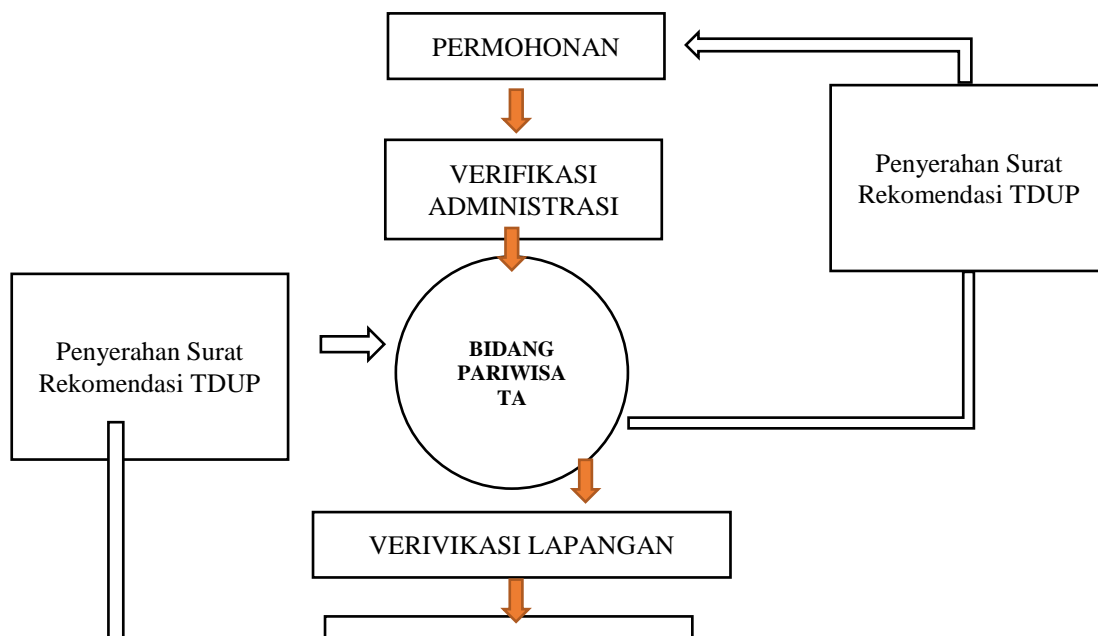
Sistem pengenalan Destinasi wisata di Kota Sungai Penuh atau dalam hal Promosi wisata memanfaatkan website, medsos komunitas dan event event yang bisa menarik wisatawan supaya tertarik berkunjung ke Kota Sungai Penuh namun semua itu tidak terlepas juga dengan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh seperti akses, transportasi, hotel dan sarana prasarana namun pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh berusaha keras untuk meningkatkan kualitas Kepariwisata yang baik. Dan mengenai efektifitas dan efisiensi memang ada ketidak seimbangan antara efektifitas dengan efisiensi, walaupun efektifitasnya baik namun efisiensinya kurang memuaskan di karenakan terlalu jauh realisasi yang didapat untuk menekan penggunaan dana untuk mendapatkan retribusi pariwisata dan tempat rekreasi di samping itu ke sistem untuk sistem pengelolaan retribusi pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh juga menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun pelan pelan di tingkatkan sistem pelaporannya seperti mulai dari pihak lapangan sampai ke dinas yang bertanggung jawaban ke pemerintah daerah di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### Retribusi Perizinan Tertentu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Seperi di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

**Gambar 3.1**  
**Alur Pelayanan Rekomendasi TDUP**



Pelaksanaan kegiatan Pariwisata bukan hanya menjadi tugas dan peran dari Pemerintah akan tetapi juga harus menjadikan peran serta masyarakat daerah tersebut, sehingga akan tercipta ke seimbangannya dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Daerah.

Upaya dari pemerintah harus menumbuhkan rasa memiliki sehingga budaya dan tradisi yang dapat di tonjolkan dan di lestariakan bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata budaya daerah yang akan menarik wisatawan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanda Daftar Usaha Pariwisata pemerintah Kota Sungai Penuh menyelenggarakan dengan sesuai peraturan yang berlaku walaupun untuk saat ini ada tempat wisata yang di kelola pihak ketiga di Kota Sungai Penuh walupun tidak adanya kerjasama antara pihak ketiga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh namun tetap di bantu oleh dinas dengan promosi wisata untuk di harapkan juga bisa membantu aspek ekonomi masyarakat Kota Sungai Penuh dengan adanya Kepariwisataannya.

#### IV. SIMPULAN

##### **Retribusi Jasa Umum**

Perkembangan Pengelolaan Retribusi Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah kota sungai penuh sebelumnya di lakukan dengan satu instansi dinas yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga pengelolaan yang sekarang yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh pada tahun 2016 menjadi instansi tersendiri dan masih terbilang baru maka sistem pengelolaan yang di lakukan sebelum dan sesudah tentunya memiliki perbedaan.

Dalam usaha meningkatkan Pemeliharaan dan Pembangunan Fasilitas di Destinasi Wisata, yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung dan merupakan salah satu bagian dari promosi pariwisata.

##### **Retribusi Jasa Usaha**

Pengelolaan Retribusi Pariwisata dan Tempat Rekreasi Kota Sungai Penuh dalam penerapannya menyatukan menjadi satu sistem pelaporan walaupun tempat wisata di Kota Sungai Penuh memiliki 2 tempat wisata yaitu Bukit Khayangan dan Taman Bunga Puti Sanang di karenakan untuk penerimaan taman Bunga Puti Sanang tidak begitu signifikan, dan dalam pelaporan pertanggung jawabannya menerapkan sistem jumlah bonggol karcis perpekan dan perbulan.

Dalam Pengelolaannya memang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh tidak ada memiliki kerjasama dengan pihak ketiga yaitu pengelola wisata yang di kelola swasta namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh tetap melakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sungai Penuh.



Kebijakan pengeloaan Retribusi dalam Penerapan target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh mengusulkan dan menunggu di tetapkan oleh BAPEDA Kota Sungai Penuh yang pada tahun 2019 target penerimaanya Rp.207.000.000 dan untuk tahun 2020 menjadi Rp.248.000.000, namun dikarenakan Pandemi maka di turunkan menjadi Rp.30.000.000.

Dari hasil perhitungan Efektifitas dan efisiensi retribusi, walaupun efektifitasnya cukup baik namun tidak terlalu efisien di bandingkan antara realisasi dengan penggunaan dana.

### **Retribusi Perizinan Tertentu**

Kebijakan dalam izin usaha di tempat wisata atau TDUP memang memiliki prosedur dan sistem tersendiri yang di terbitkan oleh lembaga OSS, Sehingga pelaku usaha harus memenuhi syarat untuk menerbitkan izin usahanya dengan mengajukan syarat dan ketentuan ke dinas Kebudayaan dan Pariwisata tepatnya ke Bidang Pariwisata sampai di verivikasi dan di seleksi sehingga dapat di eluarkan izin usahanya.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua STIA-NUSA MURLINUS, SH.,MH selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti.
2. Ketua Program Studi Strata Satu Bapak ADE NURMAJAYA PUTRA, S.Sos., M.Ap yang telah membantu dan membimbing saya selama perkuliahan.
3. Bapak Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh.
4. Bapak H.MHD.IKHSAN, SE,.MM selaku Dosen Pembimbing
5. Ibuk EMILYA GUSMITA, S.Sos.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Pemdamping
6. Bapak/Ibu Dosen beserta staf pengajar Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti.
7. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh yang telah berkerja sama membantu dalam penelitian ini.
8. Kedua Orang tua Tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil
9. Kepada Teman-teman serta rekan saya yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penulisan ini.
10. Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis selalu mendapat imbalan dari Allah SWT, dan semoga Laporan ini dapat berguna sebagaimana mestinya. Amin Ya Robbal 'alamin.

Akhirnya Penulis menyampaikan harapan semoga tulisan ini dapat di terima dan bermamfaat serta berguna untuk kepentingan kemajuan pendidikan dimana yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, AMP Safri Nugraha et al, 2007, Hukum Administrasi Negara, Depok Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*
- Panca Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia, Malang, Banyumedia.*

- Sulaiman Anwar, 2000, Pengantar Keuangan Negara dan Daerah, Jakarta, STIA-LAN Press.*
- Kesit Bambang Prakoso, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta, UII Press.*
- Irwansyah Lubis, 2010, Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum, Jakrta, Kompas Gramedia.*
- Erly Suandy, 2011, Hukum Pajak, Jakarta, Salemba Empat*
- Sumyar, 2004, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- SF Marbun, Moh.Mahfud MD, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty.*
- Rochmat Soemitro, 1992, Asas dan Perpajakan, Bandung, Eresco.*
- Tony Marsyahrul, 2006, Pengantar Perpajakan, Jakarta, Grasindo.*
- Mardiasmo, 2009, Perpajakan, edisi revisi, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.*
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, Pembaruan Hukum Pajak, Depok, RajaGrafindo Persada.*
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2002, Kebijakan Publik yang Membumi, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.*
- Haw.Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.*
- Josef Rewu Kaho, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada*
- Oka Yoeti, 1995, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung, Angkasa.*